



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TA. 2021**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.18 TELEPON (0532) 21195

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan unsur pelaksana teknis di daerah dan berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kotawaringin Barat salah satu perangkat daerah dari 38 perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki luas wilayah 10.759 Km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 269.629 jiwa, terbagi dalam 6 (enam) kecamatan serta 81 Desa dan 13 Kelurahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal sebanyak 4 (empat) buah instansi yaitu Kodim 1014 Pangkalan Bun, Polres Kotawaringin Barat, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, dan Sub Denpom Pangkalan Bun.

Perubahan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perubahan nomenklatur sebagai pengganti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat serta Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai perangkat daerah maka berkewajiban untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021 sebagai kerangka acuan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu Kepala Daerah terpilih berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah khususnya pada Tahun 2021.

BAB II

VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017–2022 adalah ***“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat :

1. Maju pembangunan sesuai **IPTEK** dan **INFRASTRUKTUR** yang representative.
2. Masyarakat yang bermoral punya **KETAKWAAN** pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Keberagaman masyarakat yang **HARMONIS**.
4. Interaksi dan pergaulan yang **LANGGENG**.
5. Keberadaan hidup yang **AMAN**.
6. Kehidupan masyarakat **SEJHTERA**, cukup pangan, sandang dan papan.

Adapun Misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017–2022 terdiri dari 6 (enam) poin sebagai berikut .

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut maka dapat dirumuskan rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat ada 2 (dua) strategi antara lain .

1. Dari perspektif masyarakat/layanan :

Strategi : Mengoptimalkan stakeholder yang ada sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

2. Dari Perspektif kelembagaan :

Strategi : Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang aman dan kondusif guna menciptakan pelayanan kesbangpol yang unggul.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat yang terpilih maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

A. Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019–2022 yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta persatuan dan kesatuan dan cinta tanah air.
2. Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif serta pencegahan dan penanganan adanya konflik.
3. Meningkatkan wawasan dan pemahaman politik serta organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang sehat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Sasaran

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan *Tujuan* diatas adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
3. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
5. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.
6. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

C. Program

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan pembinaan karakter bangsa di kalangan masyarakat. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan peran serta masyarakat, pemilih pemula dan para peserta pemilu (partai politik). Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan darr Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi memberikan pemahaman dan pembinaan kepada organisasi dan lembaga kemasyarakatan untuk peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini merupakan kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk melaksanakan program ini direncanakan melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

BAB IV
KEBUTUHAN DATA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang merupakan rencana tahunan SKPD disusun berdasarkan pada beberapa sumber-sumber data dari dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan pedoman awal dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun sumber-sumber data tersebut antara lain.

1. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019–2022.
2. Cascading Renstra Badan Kesbangpol Hasil Review Tahun 2019.
3. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021.
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021.

BAB V
RENCANA KINERJA

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik.
3. Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
5. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.
6. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Dari beberapa sasaran strategis diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator kinerja yang merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 :

1. Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA.
2. Prosentase fasilitasi pembinaan pendidikan politik didaerah Presentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif.
4. Prosentase penanganan konflik social.
5. Nilai SAKIP perangkat daerah.
6. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah.

Adapun untuk target dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2021, ***Tabel RKT dan PK Terlampir*** ,

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLTIK KAB. KTW. BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	80,01 Kategori Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	75.576.000
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	75.576.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	37.005.400
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	19 Dokumen	38.570.600
					Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan			100%	3.509.915.397
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	515 Dokumen	3.509.915.397
						Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	14 Dokumen	3.462.836.597
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	500 Dokumen	43.858.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	3.220.200						
II	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100%	158.446.026
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	23.840.000
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	5 Stell	3.000.000
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti	2 Orang/kali	20.840.000

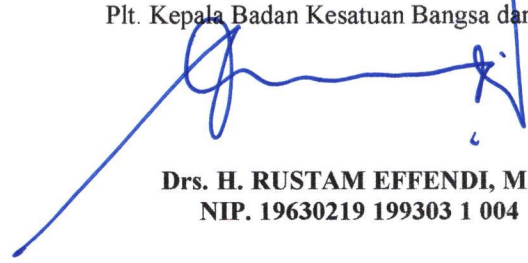
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	4 Jenis	134.606.026
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	2.499.475
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 jenis	22.679.393
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang disediakan	46915 Lembar	19.977.158
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	18 OK	89.450.000
					persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	4.947.492
					Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemd	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	1 Jenis	4.947.492
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	4.947.492
					persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	208.876.985
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	179.186.965
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	64.319.540
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	114.867.425
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2 Jenis	29.690.020
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Unit	19.693.020
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	9.997.000
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.957.761.900

III	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 kasus	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina			29,05%	562.436.200
						Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	400 Orang	562.436.200
						Sub Kegiatan: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama	50 Orang	359.094.650
						Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai	350 Orang	203.341.550
IV	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	Prosentase fasilitasi pembinaan pendidikan politik didaerah	0%	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik	Persentase pemahaman politik masyarakat			20,52%	1.359.327.890
						Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisai/ penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik	130 Orang	1.359.327.890
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelenbagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan politik masyarakat	100 Orang	45.169.700

						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Parpol	30 Orang	8.978.190
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dari Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan/Hibah Kepada Partai Politik	1 Kegiatan	1.305.180.000
V	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terbina			58%	63.209.010
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	140 Orang	63.209.010
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Tentang Ormas/LSM	140 Orang	47.390.410
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monev Ormas dan LSM	3 Laporan	15.818.600

VI	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	Prosentase penanganan konflik sosial	90%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah partisipasi instansi vertikal (tim keamanan daerah) yang terlibat dalam pencegahan tindak kriminal dan menjaga kantramtibmas			8 Instansi	276.036.000
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	51 Kegiatan	276.036.000
						Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD)	15 Laporan	35.438.300
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	3 Kegiatan	24.599.000
						Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Patroli Aparat Keamanan (Instansi Vertikal) dalam rangka cipta kondisi keamanan daerah	48 kegiatan	215.998.700
TOTAL PAGU KESELURUHAN									6.218.771.000

Pangkalan Bun, Januari 2021
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik


Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004

BAB V
RENCANA KINERJA

Demikian Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebagai wujud atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ssebagai alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, dapat mewujudkan target kinerja yang bertanggung jawab dan terarah guna menunjang pembangunan daerah.

Pangkalan Bun, Januari 2021

**Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAN KAB. KTW. BARAT**



Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004